



Buletin Parlementaria

Nomor 1054/III/V/2019 • Mei 2019



Ramadan Momen Rekonsiliasi Bangsa Indonesia



9 772614 339005



4 Pemerintah Didesak
Segera Investigasi
Tragedi Pemilu 2019



6 Komisi II Usulkan
Pansus Batam

Ramadan Momen Rekonsiliasi Bangsa Indonesia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandang perlunya bangsa Indonesia bersyukur lantaran di Ramadan kali ini berhasil menyelesaikan berbagai tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dikenal dengan Pemilu terumit di dunia. Ia mengajak di bulan yang suci ini sudah saatnya semua pihak kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan menjalin tali silaturahmi dengan semua komponen bangsa.

“Bulan Ramadan momen bangsa Indonesia untuk rekonsiliasi. Maka, terkait wacana *people power*, menurut saya tidak tepat waktunya. Karena tidak ada keadaan genting yang memaksa. Kriteria *people power* bisa terpenuhi, antara lain jika ada krisis ekonomi dan pemerintah yang otoriter. Namun, semua kriteria itu sama sekali tidak terjadi,” paparnya saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta Pimpinan Kementerian dan Lembaga, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menilai pemerintahan masih berjalan demokratis, tidak represif dan tidak ada krisis ekonomi. Bamsoet menegaskan, tidak ada alasan untuk menggaungkan atau menggulirkan wacana *people power*. Karena, kalau itu dipaksakan maka yang rugi itu adalah rakyat itu sendiri.

“Tanggal 22 Mei kebetulan bertepatan dengan *Nuzulul Quran*. Jangan ada yang menodai hari suci itu. Saya mengimbau, jangan isi hari turunnya Al Quran itu dengan kegiatan yang kontra produktif, apalagi yang bisa membahayakan kemanusiaan. Sebaiknya, di bulan suci ini mari kita



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo buka puasa bersama Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta Pimpinan Kementerian dan Lembaga, di Kompleks Widya Chandra. Foto: Jaka/hr

semua melaksanakan ibadah. Tanggal 22 Mei adalah hari turunnya Al Quran atau *Nuzulul Quran* jadi mari kita hormati bersama,” pesan Bamsoet.

Pada momen buka puasa bersama ini, seluruh tamu undangan yang hadir tampak dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut oleh Pimpinan DPR RI dan disusul Wakil Presiden Jusuf Kalla. Turut hadir sejumlah pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Saptia Odang, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua BPK Bahrul Akbar, dan Wakil Ketua KPK Laode Syarif.

Turut mendampingi Ketua DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Selain itu, nampak hadir Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan sejumlah Anggota

DPR RI. Hadir pula Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Sekjen PPP Arsul Sani.

Para Menteri Kabinet Kerja yang hadir seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo. Kemudian tampak Seskab Pramono Anung, Wakapolri Ari Dono, Kasum TNI Joni, Pimpinan BIN, Jaksa Agung M. Prasetyo, mantan Kepala BIN Hendropriyono, serta sejumlah Duta Besar Negara sahabat. ■ pun/sf



Ketua DPR: Pansel KPK Harus Segera Ditetapkan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Presiden Joko Widodo segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini penting untuk segera dilakukan sebelum masa jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada Oktober mendatang.

"Kami sependapat bahwa memang seharusnya pemerintah segera menetapkan SK Pembentukan Pansel. Sehingga sebelum berakhir jabatan Oktober nanti, sekitar bulan September kita sudah bisa selesaikan Calon Pimpinan KPK yang baru," jelasnya usai buka puasa bersama di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menargetkan pemilihan di tingkat Pansel sudah bisa dilakukan di bulan Juni. Pansel ini kemudian akan memilih sepuluh nama

Calon Pimpinan KPK. Selanjutnya, DPR RI akan memilih lima nama yang akan menjabat sebagai Pimpinan KPK yang baru.

Pada acara yang sama Presiden Joko Widodo mengatakan sedang menyusun nama-nama yang akan mengisi Pansel KPK. Jokowi menjanjikan Pansel KPK akan terbentuk pada pekan ini. "Pansel KPK InsyaAllah minggu ini sudah ditandatangani. Baru di-godog, banyak nama sudah masuk, dan tinggal kita putuskan," ujarnya.

Lebih lanjut, nama-nama yang akan bergabung dalam Pansel KPK berasal dari kalangan akademisi, praktisi, pemerintah, hingga *non-government organization* (NGO). Sebagai informasi, masa jabatan Pimpinan KPK periode 2015-2019 akan berakhir pada 21 Desember 2019. Pimpinan KPK yang baru akan menjabat pada periode 2019-2023. ■ *alw/sf*



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Odjie/JK



Ramadan Momen Rekonsiliasi Bangsa Indonesia

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nuraini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspipta

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Pemerintah Didesak Segera Investigasi Tragedi Pemilu 2019



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI). Foto: Kresno/JK

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI). Dalam pertemuan tersebut IKB UI mengadukan berbagai macam tragedi yang terjadi pada Pemilu 2019, diantaranya kasus meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan indikasi kecurangan. Terkait aduan tersebut Fadli mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi atas tragedi Pemilu 2019.

“Karena itu kita akan mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi terhadap hal ini. Di DPR juga supaya membentuk tim pencari fakta, sebagai partisipasi kita,” ungkap

Fadli usai menerima audiensi IKB UI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah.

Menurut IKB UI, musibah kematian lebih dari 500 petugas KPPS dan sekitar 3800 orang petugas KPPS yang sakit di seluruh Indonesia adalah ironi dalam kegiatan pesta demokrasi Pemilu 2019, dan patut menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan menurutnya musibah tersebut bisa melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang HAM, dan Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP.

“Saya dalam hal ini mempunyai pandangan yang sama tentang berbagai kejadian yang terjadi

akhir-akhir ini, baik itu menyangkut kecurangan Pemilu pada saat dan setelah, kemudian ekses-ekses lain yang luar biasa, terkait dengan meninggalnya petugas KPPS dan juga ada yang sakit di atas tiga ribuan,” papar Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.

Terkait dengan usulan pembentukan Pansus Pemilu 2019, Fadli menjelaskan di DPR RI memiliki mekanisme yang panjang. “Usulan pembentukan Pansus harus mendapat persetujuan di Rapat Paripurna. Usulan itu diajukan ke Pimpinan, Pimpinan mengagendakan ke Bamus, Bamus mengagendakan dalam Rapat Paripurna. Jadi proses dan prosedurnya cukup panjang,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. ■ **eko/sf**

Tiga Kabar Gembira Iringi Pertemuan Ketua DPR dengan Dubes Arab Saudi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kedatangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Y.M Esam A. Abid Althagafi sebagai pejabat baru Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia. Dalam pertemuan, terungkap kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi calon jemaah Haji dan Umrah. Kerajaan Arab Saudi membatalkan pemberlakuan sistem biometrik bagi calon jemaah Haji dan Umrah asal Indonesia.

“Berkah Ramadan, dalam pertemuan ada tiga hal yang kami bahas dan perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pembatalan pemberlakuan sistem biometrik bagi calon jemaah Haji dan Umrah Indonesia,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, usai pertemuan dengan Dubes Kerajaan Arab Saudi di

”

**...PEMBATALAN
PEMBERLAKUAN
SISTEM BIOMETRIK
BAGI CALON JEMAAH
HAJI DAN UMRAH
INDONESIA,”**

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

Pembatalan tersebut, lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, dikarenakan Kerajaan Arab Saudi menyadari bahwa Indonesia masih membutuhkan waktu untuk penerapan sistem biometrik yang menyulitkan bagi jemaah Haji dan Umrah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Kerajaan Arab Saudi juga menginformasikan akan

adanya penambahan kuota Haji kembali bagi Indonesia untuk tahun depan. Dan khusus untuk 10 ribu calon jemaah Haji tambahan pada tahun ini juga akan diberikan kemudahan administrasi, atau kemudahan pembuatan Visa.

Bamsoet juga mengatakan, selain hal terkait Haji dan Umrah, dalam pertemuan dengan Dubes Arab Saudi ini juga dibahas tentang realisasi rencana pembangunan kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah, yang notabene merupakan kerja sama Indonesia-Arab Saudi.

“Raja Arab Saudi sudah memerintahkan Kementerian Energinya untuk segera merealisasikan pembangunan kilang minyak di Cilacap, yang merupakan kerja sama Pertamina dari Indonesia dengan Arab Saudi,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. ■ **ayu/sf**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Y.M Esam A. Abid Althagafi. Foto: Azka/JK

Komisi II Usulkan Pansus Batam



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Arief/JK

Dualisme penataan kawasan Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau menimbulkan tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Wali Kota Batam. Pemerintah Pusat lewat Dewan Kawasan Batam bahkan menunjuk Wali Kota Batam sebagai *ex officio* BP Batam. Inilah yang memunculkan desakan agar Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian masalah Batam.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron dengan Ombudsman, KADIN Batam, KADIN Kepri, Kemenkum HAM, dan Lembaga Kajian Universitas Gadjah Mada (UGM) terungkap, rangkap jabatan (*ex officio*) Wali Kota Batam untuk menjadi Kepala BP Batam telah menyalahi regulasi. Seperti diketahui, jabatan Kepala BP Batam ada di wilayah ekonomi dan bisnis. Sementara Wali Kota ada di wilayah pemerintahan.

“Komisi II memandang penunjukkan Wali Kota Batam sebagai *ex officio*

Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi II mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan *free trade zone* menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberi dampak khusus pada usaha kecil menengah dan masyarakat Batam, serta masyarakat Kepri pada umumnya,” jelas Herman saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

Lembaga Kajian UGM juga merilis hasil kajiannya yang menyatakan bila Wali Kota Batam menjadi *ex officio* Kepala BP Batam, akan terjadi maladministrasi. Sebenarnya tidak terjadi dualisme kepentingan penataan di Batam. Sekali lagi Batam adalah wilayah khusus dengan kerja khusus pula. Menurut Herman, perlu ada kebijakan pemerintah yang komprehensif untuk menata ulang Batam. Komisi II DPR RI pun akan meminta penjelasan kepada Dewan Kawasan Batam yang diketuai Darmin Nasution.

Namun, Darmin tak kunjung hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Padahal, ini persolan yang sangat

”

**...PERLU ADA
KEBIJAKAN
PEMERINTAH YANG
KOMPREHENSIF
UNTUK MENATA
ULANG BATAM.**

penting untuk dibahas. Bahkan, Anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo menegaskan ketidakhadiran Darmin sangat melecehkan Parlemen. Untuk itu, keberadaan Pansus DPR RI untuk penyelesaian masalah Batam menjadi sangat urgen.

“Komisi II juga mendesak pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan hubungan kelembagaan BP Batam dengan Pemkot Batam yang mempertimbangkan aspek regulasi, ekonomi, dan kelembagaan yang tidak bertentangan dengan UU yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait,” tambah Herman lagi. ■ mh/sf

Penunjukkan Wali Kota Batam Sebagai Ex Officio Kepala BP Batam Berpotensi Maladministrasi

DPR RI mengingatkan Pemerintah untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dengan rencana mengangkat Wali Kota Batam sebagai *Ex Officio* Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Untuk itu, DPR RI minta Pemerintah menengguhkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan ketika ada sebuah peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka sebaiknya tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, tugas dari DPR RI adalah mengingatkan kepada pemerintah, bahwa rencana pengangkatan Wali Kota Batam sebagai *Ex Officio* Kepala BP Batam berpotensi maladministrasi.

“Saya mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa ini ada hasil daripada kajian yang dilakukan lembaga Ombudsman ini maladministrasi. Oleh karena ini, kita tegaskan ini harus dihentikan, agar pemerintah tidak salah,” katanya usai RDP Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Kementerian Hukum dan HAM, BP Batam, Lembaga Kajian UGM, KADIN Kepulauan Riau dan KADIN Kota Batam, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo berbincang dengan mitra kerja. Foto: Arieff/JK

Komisi II DPR RI meminta pemerintah agar membuat PP mengenai hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, agar dapat diatur dengan jelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemkot dan BP Batam sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 360 ayat 4.

“Dan oleh karena itu, pada hari ini DPR dengan tegas meminta pemerintah menengguhkan pembahasan RPP yang sedang dirumuskan yang dijadikan dasar hukum untuk melegitimasi untuk

Ex Officio. Sepatutnya Pemerintah mengatur dengan jelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemkot dan BP Batam,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Firman juga mengingatkan, DPR RI sebagai mitra kerja Pemerintah untuk mengingatkan jika ada pelaksanaan regulasi yang salah. “Itu jelas-jelas bertentangan dengan UU. Maka dari itu, kalau ini tetap dilakukan penyelenggara pemerintahan bisa melanggar UU. Sejelek-jeleknya yang dilakukan bisa dibentuk Pansus, atau bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan impeachment. Ini bahaya!” tegas legislator dapil Jawa Tengah III itu.

■ as/sf

Calon Hakim Agung Mulai Buat Makalah

Empat calon Hakim Agung mulai mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR RI. Pada tahap pertama uji kelayakan ini masing-masing calon diminta membuat makalah sesuai judul yang telah ditetapkan Komisi III DPR RI. Rapat uji

kelayakan ini dibuka Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir.

Dalam uji yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5), hadir pula beberapa Anggota Komisi III DPR RI lainnya seperti John Kenedy Aziz dan Muhammad Syafi'i. Keempat calon Hakim Agung ini untuk mengisi beberapa posisi Hakim Agung yang kosong karena pensiun. Setelah uji makalah ini akan ada uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada 20 Mei mendatang.

Pada uji pembuatan makalah, masing-masing calon diberi waktu satu jam untuk menyelesaikan makalahnya. Antarcalon diberi tema yang berbeda-beda terkait isu aktual di bidang penegakan hukum.

Temanya secara tertutup ada dalam amplop yang dipilih secara acak oleh para calon di meja pimpinan rapat. Panjang pembuatan makalah ditetapkan hingga lima halaman.

Sementara itu keempat calon yang mengikuti uji pembuatan makalah kali adalah Ridwan Mansyur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Ia bertugas di kamar peradilan perdata. Ada lagi Matheus Samiaji, seorang hakim tinggi dari Pengadilan Sulawesi Tengah. Ia bekerja di kamar peradilan perdata. Dua calon lagi masing-masing Cholidul Azhar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, dan Sartono, Wakil Ketua III Pengadilan Pajak. ■ mh/sf



**ANTARCALON DIBERI
TEMA YANG BERBEDA-
BEREDA TERKAIT ISU
AKTUAL DI BIDANG
PENEGAKAN HUKUM.**



Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir pimpin rapat uji kelayakan Hakim Agung. Foto: Ariel/JK

Komisi IV Pertanyakan Melambungnya Harga Bawang Putih



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyapa mitra kerja sebelum memulai rapat. Foto: Andri/JK

Komisi IV DPR RI mempertanyakan melambungnya harga bawang putih di bulan Ramadan dan mendekati hari raya Idul Fitri yang tembus mencapai angka Rp 120 ribu per kilogramnya. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengakui, hal ini memang bukan pertama kali yang terjadi. Padahal Indonesia membeli bawang putih di luar negeri, hanya sekitar 1 dollar Amerika Serikat (kurs Rp 14.400 per 1 dollar AS). Kalau 1 dollar AS menjadi Rp 120 ribu, itu hampir 10 kali lipat.

“Apakah sistem komunikasi atau sistem pembinaan perdagangan ke pengusaha Indonesia seperti ini yang kita harapkan. Walaupun kita produsen, mengurus produksi kita juga punya kewajiban. Sebagai produsen kita juga tidak mau tiba-tiba harga yang kita jual

melonjak 10 kalinya di pasaran, ini akan membunuh sistem ekonomi kita sendiri,” kata Edhy saat memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bulog, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, untuk jangka panjang hal ini juga tidak akan mempertahankan keberlangsungan. Karena konsep utama dari berdagang adalah *sustainable* atau keberlangsungan. Untuk itu, ia mengusulkan agar ke depan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam memberikan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) kepada pengusaha, dicantumkan kontrak agar tidak mempermainkan harga.

“Pasalnya, jika dinaikkan harga menjadi Rp 40 ribu saja per kilogramnya, artinya sudah naik lebih

dari tiga kali lipat dari harga beli di negara asalnya. Bagi masyarakat Indonesia, bawang putih ini sejatinya menjadi salah satu produk yang paling dinikmati. Tanpa bawang putih, makanan bagi masyarakat Indonesia masih terasa kurang,” imbuh Edhy.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hasanuddin. Selain mempertanyakan peningkatan harga bawang putih di pasaran, ia juga mempertanyakan masih tidak keluarnya izin impor bawang putih yang diterima Bulog. Padahal sejatinya Bulog bisa melakukan impor bawang putih sebagaimana yang ditetapkan dalam rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Tanggal 18 April 2019, RIPH sudah diberikan 115 ton impor bawang putih kepada 8 importir, sementara rencananya 120 ribu ton lagi akan diberikan kepada 11 importir. Di sini, Bulog juga diberikan izin untuk mengimpor bawang putih. Lalu pertanyaannya kenapa sampai sekarang izin itu tidak juga diberikan oleh Menteri Perdagangan ke Bulog. Saya berharap ini dibuka sejelas-jelasnya,” ungkap politisi F-PPP ini.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan bahwa persetujuan impor bawang putih kepada Bulog sebesar 100 ribu ton itu ditetapkan dalam Rakortas beberapa Menteri pada 18 Maret lalu. Dengan skema RIPH yang di dalamnya terdapat wajib tanam lima persen, dan ditambah dengan skema penugasan kepada Bulog. Dengan demikian, ia berharap harga dalam enam bulan ke depan dapat dikendalikan. ■ **ayu/sf**

Rute Penerbangan Bandara Kertajati Belum Optimal

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menerima kunjungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin Ali Hasan, yang datang menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur di wilayah Provinsi Jabar. Salah satu fokus masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai optimalisasi operasional Bandara Kertajati di Majalengka. Karena sampai saat ini masih banyak perusahaan maskapai penerbangan yang belum memindahkan jalur penerbangannya dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.

“Ada empat persoalan yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu persoalan yang berkaitan dengan Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimbang, Bandara Cikembar, dan masalah jalan tol. Apa yang (telah) disampaikan DPRD Jawa Barat menjadi catatan bagi kami dan hal itu juga sudah disuarakan Anggota Komisi V dapil Jawa Barat. Kita akan terus menyuarakan dengan pemahaman yang sama, bagaimana supaya Bandara Kertajati bisa dioptimalkan, dan rute penerbangan di Bandara Husein Sastranegara (bisa) digeser,” ucap Fary di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/5).

Fary mengatakan, dari penjelasan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di Bandara Kertajati masih ada komponen kebandaraan yang belum standar. “Kalau memang belum standar, kenapa secepatnya diresmikan. Menurut catatan, sekarang ini hanya ada satu penerbangan yakni maskapai Citilink tujuan Surabaya. Itu menjadi isu kita bersama. Memang saat ini ada upaya untuk cepat menyelesaikan jalan



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Foto: Jaka/JK

tol sebagai akses ke Bandara Kertajati. Ini menjadi masukan bagi Komisi V, dan kami akan pertanyakan langsung kepada maskapai penerbangan, kenapa mereka tidak memindahkan rute penerbangannya ke situ (Bandara Kertajati),” papar Fary.

Di tengah pertemuan, politisi Fraksi Partai Gerindra itu sempat dihubungi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Fary langsung mempertanyakan tentang pemanfaatan Bandara Kertajati. Dan didapatkan kabar bahwa mulai tanggal 15 Juni 2019 mendatang, sudah ada kepastian dari pihak maskapai penerbangan terkait pemindahan rutenya ke Bandara Kertajati.

Sebelumnya, Ketua Rombongan DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan meminta kepada Komisi V DPR RI agar mendorong Pemerintah Pusat supaya memberikan kepastian yang kuat terkait pemindahan operasional penerbangan dari Bandara Husein

Sastranegara ke Bandara Kertajati. Dikatakannya, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Pada pertemuan tersebut mereka mendapat informasi bahwa akan dilakukan pergeseran sebagian rute penerbangan yang ada di Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.

“Kita sesungguhnya berharap betul semua penerbangan komersial digeser ke Bandara Kertajati. Baru dengan demikian, Kertajati yang (pembangunannya) menelan biaya triliunan itu bisa berfungsi secara optimal. Memang ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebagai infrastruktur pendukungnya, seperti rumah sakit, hotel, dan termasuk juga asrama Haji. Kita butuh regulasi yang tegas supaya penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara digeser ke Kertajati,” tutur Ali Hasan. ■ dep/sf

Pemerintah Didesak Standardisasi Harga Pangan

Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, hampir bisa dipastikan harga komoditas pangan akan merayap naik. Pola kenaikan harga pangan ini selalu berulang kali setiap tahunnya dan menysar hampir seluruh bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Bahkan, harga sejumlah komoditas pangan ini akan semakin melambung tinggi ketika mendekati Lebaran. Pemerintah perlu melakukan standarisasi harga pangan.

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini terjadi diduga diakibatkan ulah pedagang yang ingin mengeruk keuntungan lebih pada momen

khusus ini. Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati menilai lonjakan harga komoditas tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat. Sehingga sebaiknya pemerintah harus cepat mengambil tindakan agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

“Saya sering turun langsung ke pasar dan melihat harga yang melambung tinggi, apalagi di bulan puasa ini dan menjelang Lebaran, sehingga banyak masyarakat bawah yang tidak mampu untuk membelinya,” paparnya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Deputy Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perum Bulog di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Untuk itu, politisi Partai Demokrat

”

MENDORONG PEMERINTAH UNTUK MENINDAK TEGAS SETIAP PEDAGANG YANG MENAIKKAN HARGA KOMODITAS TANPA ADANYA STANDARISASI YANG TEPAT AGAR KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DAPAT TERATASI.

itu mendorong pemerintah untuk menindak tegas setiap pedagang yang menaikkan harga komoditas tanpa adanya standarisasi yang tepat agar kenaikan harga kebutuhan pokok dapat teratasi. “Kepada pemerintah sebaiknya menginformasikan hal ini kepada publik bahwa siapa saja pedagang yang menaikkan harga kebutuhan pokok tanpa melalui standarisasi yang tepat akan segera ditindak agar masalah ini dapat teratasi,” imbuh legislator dapil Jawa Barat itu.

Dalam rapat itu terungkap sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran sudah mengalami kenaikan harga, walaupun tidak signifikan, misalkan daging ayam, gula dan beras. Untuk daging ayam sebelumnya seharga Rp 30 ribu/kg, kini menjadi Rp 35 ribu/kg. Untuk gula, yang sebelumnya seharga Rp 10.500/kg, kini menjadi Rp 11.500/kg. Namun ada sejumlah bahan pokok makanan yang sebelumnya naik, tetapi sekarang sudah turun. Misalkan harga bawang putih yang berada dikisaran Rp 50-60 ribu/kg, kini Rp33 ribu/kg. ■ **tn/sf**



Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati. Foto: Jaka/JK

Komisi VII Minta Pemerintah Serius Tangani Persoalan Sampah Plastik

Indonesia saat ini tercatat sebagai negara penyumbang limbah plastik terbesar kedua di dunia. Dengan sejumlah limbah plastik sebesar 3,2 juta ton per tahun dari total 64 juta ton per tahun volume sampah plastik yang berhasil diolah di Indonesia. Terkait hal itu, Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah segera melakukan upaya antisipasi penanganan sampah plastik tersebut secara serius.

“Salah satu dampak dari kekuatan pencemaran sampah plastik adalah ditemukannya ikan dan garam di beberapa wilayah perairan Indonesia telah terkontaminasi sampah plastik dan sangat berbahaya bagi kesehatan bagi manusia dan lingkungan hidup,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir.

Hal itu ia katakan saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas penanganan sampah dan limbah plastik dan pengawasan terhadap kebijakan impor limbah, serta penanganan kasus pasca tambang, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, hal tersebut juga diperparah dengan ditemukannya sampah plastik pada kegiatan impor beras bekas, padahal peraturan yang ada secara jelas melarang memasukkan sampah limbah ke wilayah Indonesia.

“Pemerintah melalui Kementerian LHK perlu melakukan upaya penanganan, khususnya mengantisipasi sampah plastik dan sampah secara umum, serta mengkaji kebijakan impor beras bekas dan sampah plastik untuk kebutuhan industri,” tegas Nasir.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Foto: Kresna/JK

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dari 67 sampai 68 juta ton sampah di Indonesia, pada tahun 2013, sebanyak 14 persennya adalah sampah plastik. Pada tahun 2016 naik menjadi 16 persen, dan tahun 2018 dengan berbagai upaya sampah plastiknya turun 1 persen menjadi 15 persen.

“Kami juga melakukan observasi baik di wilayah pesisir maupun di kawasan Taman Nasional, ternyata sampah plastik di wilayah pantai atau pesisir itu jumlahnya 31 persen dari sampah. Tetapi di kawasan Taman Nasional komposisinya ternyata mencapai 60 persen dari sampah. Ada korelasinya dengan perilaku pengunjung,” papar Siti Nurbaya.

Terkait kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh KLHK, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sampah saat

ini harus menjadi sumber daya bukan hanya sekedar menjadi sampah. Arah kebijakan dalam penanganan sampah yaitu dengan cara sampahnya dikurangi dan sampahnya ditangani.

“Targetnya untuk tahun 2025, sampah dikurangi sebanyak 30 persen dari timbunan sampah yang ada secara nasional, yaitu dengan cara membatasi timbunan sampah, melakukan daur ulang sampah atau pemanfaatan kembali. Penanganan sampah dengan target 70 persen pada tahun 2025 yakni dengan cara pemilahan, daur ulang, pengangkutan, pengolahan maupun proses akhir,” jelasnya.

Dikatakannya, indikator keberhasilan dari pengurangan sampah yaitu menurunkan munculnya sampah per kapita, menurunkan timbunan sampah pada sumber, juga mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. ■ dep/sf

Ketersediaan BBM Jelang Mudik Harus Diperhatikan



Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian. Foto: Anief/JK

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengingatkan, jelang arus mudik Lebaran mendatang, Pertamina harus mampu menjamin ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) di setiap daerah, agar tidak terjadi kelangkaan yang mengakibatkan kerugian terhadap para pemudik. Ia memastikan, pihaknya akan memantau secara langsung ketersediaan BBM di sejumlah daerah.

“Terkait ketersediaan BBM menjelang arus mudik ini, kita akan melakukan pengecekan langsung ke daerah yang memang padat oleh pemudik agar ketersediaan BBM betul-betul sudah diantisipasi,” katanya saat mengikuti RDP dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas

Bumi Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).



PERTAMINA HARUS MAMPU MENJAMIN KETERSEDIAAN STOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI SETIAP DAERAH, AGAR TIDAK TERJADI KELANGKAAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PARA PEMUDIK.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan, Komisi VII DPR RI akan meminta penjelasan langsung dari Pertamina terkait upaya dan solusi lain yang akan diambil dalam kesiapan menghadapi arus mudik tahun 2019, sehingga masyarakat lebih tenang. Ia juga meminta Pertamina juga memperhatikan ketersediaan gas elpiji di daerah-daerah tertentu yang dilintasi oleh arus pemudik, agar tidak terjadi kelangkaan.

“Yang harus diperhatikan bukan hanya dari kesediaan bahan bakar minyak saja, tetapi juga memperhatikan kesediaan gas elpiji, terutama di daerah-daerah yang banyak dimasuki oleh pemudik, agar nantinya tidak terjadi kelangkaan,” pesan legislator dapil Jawa Tengah X tersebut. ■ **tn/sf**

Undang Pemuka Agama Se-Jabar, Komisi VIII Serap Aspirasi RUU Pesantren dan Dikdag

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (Dikdag) di Jawa Barat. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, dengan mengundang Rektor UIN Bandung, pimpinan pondok pesantren, pemuka Agama Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan berbagai tokoh agama yang ada di wilayah Jawa Barat.

“Tujuan kita menyerap aspirasi ini

”

TUJUAN KITA MENYERAP ASPIRASI INI DALAM RANGKA MELAKUKAN KOMUNIKASI INTENSIF ANTARA DPR RI KHUSUSNYA KOMISI VIII DPR DENGAN DAERAH DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERKAITAN DENGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN AGAMA,”



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Chasbi/JK

dalam rangka melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR dengan daerah dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan Pesantren dan Pendidikan Agama,” ujar Ace kepada *Parlementaria*, Senin (13/5).

Di sisi lain, papir politisi Partai Golkar itu, Kunspek ini dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. “Kita ingin menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat,”

terangnya.

Ace memaparkan, selama ini anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun faktanya, muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. Hal tersebut berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan kualitas serta mutu pendidikan madrasah maupun pesantren. ■ *si/sf*

Komisi IX Pertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja.

"Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mengurangi pengangguran di Indonesia di era digital," tanya Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)

Komisi IX DPR RI dengan para Dirjen Kemnaker, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (15/5).

Ia juga mempertanyakan produktifitas BLK dalam menciptakan lapangan kerja dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas. "BLK yang ada, sebenarnya produktifitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas itu berapa. Bisa *enggak* bapak paparkan kepada kita data-data itu," ujar Saleh.

Politisi F-PAN ini khawatir masalah pengangguran akan terus menerus ada dan tak terselesaikan. "Saya khawatir Bangsa Indonesia z m zvv bisa menyelesaikan, sementara

pengangguran tinggi. (Jumlah) 6,8 juta adalah rakyat yang perlu mendapat perhatian. Amanat konstitusi, disebutkan setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," papar Saleh.

Di sisi lain, salah satu Dirjen Kemnaker mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah peluang kerja yang terbatas. Sementara itu ada penambahan angkatan kerja baru yang cukup besar. Masalah lain yang juga dihadapi ada ketidakcocokan keterampilan kerja yang dikuasai dengan lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi posisi tawar angkatan kerja yang rendah di pasar tenaga kerja. ■ **eko/sf**



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Andrie/od

Legislator Apresiasi Pelaksanaan UNBK 2019

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. Menurut Reni, pelaksanaan UNBK tahun 2019 oleh pelajar SMA, SMK dan sederajat, pelajar SMP dan sederajat, serta pelajar SD dan sederajat pada Maret-April lalu jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan UNBK yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini momentum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan peningkatan proses pembelajaran yang lebih baik, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi,” ungkap Reni sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Menurut legislator F-PPP itu, keberhasilan juga dapat dilihat dari reaksi pelajar dalam menghadapi tingkat kesulitan soal

”

INI MOMENTUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELAKUKAN PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN YANG LEBIH BAIK...

penalaran atau *High Order Thinking Skill* (HOTS). “Tahun ini tidak ada respon berlebihan dari pelajar. Semuanya relatif berjalan tertib, baik dan kredibel. Maka perlu diapresiasi,” imbuh Reni.

Bahkan ia mendapat informasi, nilai yang didapatkan pelajar perempuan lebih tinggi daripada pelajar laki-laki. “Sebagai perempuan saya bangga akan hal ini, karena kita tahu peran perempuan sangat penting dalam memajukan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” apresiasi legislator dapil Jawa Barat IV itu.

Meskipun pelaksanaan UNBK tidak ditemukan kendala, ia berharap pemerintah terus melakukan penyempurnaan dalam menghadapi UNBK selanjutnya.

“Tinggal penyempurnaan saja baik dalam pelaksanaan maupun dalam proses belajar pelajar. Karena UNBK tidak bisa ditawar lagi,” tutup Reni seraya mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat kerja evaluasi UNBK dengan Kemendikbud.

■ rmm/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. Foto: Kresno/JK

Tiga Isu Krusial Warnai Pembahasan RUU Sisnas Iptek

Tiga isu krusial mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) yang tengah dibahas Pansus DPR RI dan pemerintah. Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto mengatakan, salah satu isu krusial yang menjadi bahasan adalah mengenai batasan usia peneliti.

“Pertama terkait batasan usia atau usia pensiun seorang peneliti, dimana dalam RUU ini pemerintah memberikan batasan hingga usia 70 tahun,” kata Daryatmo saat memimpin Rapat Pansus RUU Sisnas Iptek di ruang rapat Pansus DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Selain usia pensiun, dalam Rapat Pansus tersebut juga membahas tentang pendanaan dalam penelitian. Dimana ada lima usulan sumber dana, yakni APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah. Kedua pendanaan penelitian berasal dari 2,5 hingga 5 persen dari APBN. Ketiga berasal dari 0,5 persen dana abadi riset yang diambil dari 20 persen anggaran pendidikan.

“Keempat, dana bersumber dari 10 persen dari APBD, dan usulan ke lima pendanaan penelitian bersumber dari badan usaha yang diberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak (*tax deduction*) paling banyak 300 persen,” tukas politisi PDI-Perjuangan itu.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya

”

PERTAMA TERKAIT BATASAN USIA ATAU USIA PENSUN SEORANG PENELITI, DIMANA DALAM RUU INI PEMERINTAH MEMBERIKAN BATASAN HINGGA USIA 70 TAHUN,”

terkait pembahasan RUU ini adalah tentang adanya sanksi administratif atau ketentuan pidana bagi peneliti. Hal ini yang menurut Daryatmo masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi peneliti. Menurutnya, perlu adanya penghargaan kepada hasil penelitian, namun di sisi lain juga secara adil harus memberikan sanksi terhadap aktivitas peneliti dan hasil-hasil penelitiannya yang menyimpang.

“Hal inilah yang kemudian dianggap mengganggu semangat penelitian. Padahal kami berusaha untuk memberikan rambu yang sejatinya untuk melindungi peneliti itu sendiri, namun sekaligus mendorong penelitian itu. Dengan kata lain, kami ingin memberikan *reward* terhadap hasil-hasil penelitian. Tentu saja kalau ada *reward* harus ada *punishment*,” jelasnya

Legislator dapil Jawa Tengah II itu menambahkan, sanksi-sanksi inilah yang masih akan dibahas Pansus ke depannya. Ia berharap di akhir masa jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019, RUU tersebut dapat terselesaikan dengan baik. ■ ayu/sf



Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto. Foto: Geradi/JK

Setjen DPR Minta KemenPAN-RB Ubah Metode Penilaian RB Untuk DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) untuk mengubah metode penilaian Reformasi Birokrasi untuk DPR RI yang selama ini disamakan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Pasalnya menurut Indra, tugas dan fungsi DPR RI berbeda dengan kementerian atau lembaga negara yang lain.

Hal tersebut diungkapkan Indra saat Sosialisasi Kebijakan dan Mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

“Kami tentunya sebagai organisasi supporting system daripada Anggota Dewan, kondisi-kondisi subjektifnya berbeda dengan eksekutif, karena *stakeholder* utama kami adalah Anggota Dewan sebanyak 560 Anggota DPR RI serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan segala sesuatu berkaitan dengan kepentingan itu harus kami akomodir,” tutur Indra.

Dalam sosialisasi tersebut Indra menambahkan, di lingkungan eksekutif semuanya sudah terukur, berbeda dengan Setjen dan BK DPR RI yang melayani 560 Anggota DPR RI dan mempunyai target Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas). “Misal ditarget 52 RUU dan tiba-tiba Pimpinan menambahkan 6 RUU inisiatif dewan, jadi sangat berbeda antara eksekutif dan di legislatif,” tutur



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Odjie/JK

Indra.

Hal serupa juga di sampaikan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Inosentius Samsul. Ia menilai, ada perbedaan metode penilaian RB di DPR RI. “Dalam penilaian reformasi birokrasi harus disesuaikan dengan konteksnya. Perlakuan kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berbeda. Jangan sampai kita melakukan metode penilaian yang salah,” tutur Sensi, sapaan akrabnya.

Menanggapi masukan terhadap penilaian RB untuk DPR RI, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi KemenPAN-RB Naptalina Sipayung menyambut baik masukan tersebut dan akan membicarakan lebih lanjut terkait metode penilaian yang selama ini dilakukan untuk Setjen dan BK DPR RI.

“Kami tidak tahu kendala yang

dihadapi selama ini. Dengan adanya masukan ini akan kami perbaiki untuk metode penilaian yang selama ini kami lakukan. Ini salah satu manfaat yang kami terima dari diskusi ini. Dari segi pertanyaan nantinya ada yang kami ubah terkait pelayanan Setjen kepada Anggota DPR dan pertanyaan akan kami sesuaikan dengan responden yang akan diberikan,” tutupnya.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia yang ada di pemerintah. Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. ■ rh/sf



Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti membuka Bazar Ramadan dan Sembako Murah.
Foto: Jaksa/JK

Bazar Sembako Murah Penuhi Kebutuhan Karyawan DPR Jelang Lebaran

berkontribusi atas terselenggaranya acara ini,” katanya usai membuka Bazar Ramadan dan Sembako Murah di Pelataran Pujasera DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Maya, sapaan akrabnya, berharap dengan terselenggaranya bazar Ramadan dan sembako murah yang diadakan KORPRI, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan dapat terpenuhi semua. Namun dirinya mengimbau para karyawan agar bijak dalam berbelanja. “Utamakan kebutuhan, bukan apa yang diinginkan. Sehingga manfaat bazar ini terus berlanjut dari tahun ke tahun dan semakin baik ke depannya,” pesan Maya.

Dalam kesempatan tersebut, KORPRI Setjen dan BK DPR RI juga telah menyantuni 10 orang anak yatim sebagai ungkapan syukur dan berbagi di bulan Ramadan. Maya juga berharap semoga ke depannya Setjen dan BK DPR RI dapat meningkatkan jumlah santunan yang diberikan kepada anak yatim, sebagai berkah berbagi kepada anak-anak kurang mampu.

Sementara Pelaksana Tugas Ketua Korpri Setjen dan BK DPR RI Indra Pahlevi menjelaskan, bazar akan berlangsung selama tiga hari, pada Rabu-Jumat (15-17/5/2019), dengan menghadirkan kurang lebih 45 pelaku UMKM yang menjual berbagai varian dagangan, seperti pakaian, makanan dan sembako. Untuk sembako, KOPRI Setjen dan BK DPR RI telah bekerjasama

dengan Perum BULOG, sehingga harganya sangat terjangkau.

“Sembako tentu yang paling dibutuhkan, ada beras, minyak, dan tepung terigu itu kebutuhan sehari-hari. Jadi memang kita mendorong itu. Dan juga dari Koperasi Setjen DPR juga untuk menjual komoditas itu. Karena target kita tentu bukan target orang yang belanja mahal-mahal, tapi yang terjangkau, makanya kita tampilkan pelaku UMKM,” katanya.

Demi meningkatkan pelaksanaan kegiatan bazar Ramadan dan sembako murah yang digelar rutin setiap tahunnya, Indra mengaku akan terus mengembangkan dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan Ramadan yang dibutuhkan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Meskipun saat ini kendala yang muncul adalah lahan untuk tempat berjualan, namun diakuinya itu bukanlah hal yang menjadi masalah. Ia tetap mengajak seluruh karyawan dan komunitas UMKM untuk berbelanja di bazar Ramadan ini.

“Masih ada kendala pada tempat, tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Karena yang paling penting adalah kita akan mengajak seluruh karyawan dan komunitas yang ada di DPR ini untuk berbelanja di sini. Kapan lagi waktunya kan hanya setahun sekali ada bazar murah dan terjangkau, dan saya pikir itu harus dimanfaatkan betul-betul oleh semua karyawan yang ada di DPR,” tutupnya. ■ ndy/sf

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengapresiasi penyelenggaraan Bazar Ramadan dan Sembako Murah yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Setjen dan BK DPR RI yang telah menyediakan barang-barang kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri dengan harga terjangkau. Mengingat hal itu yang dibutuhkan oleh karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjelang Lebaran.

“Alhamdulillah, bazar ini menjual barang-barang harga terjangkau, terutama sembako yang menjadi kebutuhan Lebaran. Apresiasi saya karena KORPRI bisa bekerja sama dengan Perum BULOG yang menyediakan barang-barang tersebut. Dan saya juga apresiasi kepada Bank BRI, Mandiri, dan BNI yang telah

BK DPR Terima Konsultasi DPRD Banyuwangi

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Rudi Rochmansyah menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Banyuwangi. Konsultasi tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya terkait kadar dan klasifikasi presentase minuman beralkohol yang diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

"Kesimpulan sementara pembahasan Panitia Kerja (Panja) sampai dengan tanggal 30 Januari 2017, kadar minuman beralkohol dibagi menjadi empat golongan. Mulai dari golongan A yang merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sampai dengan 5

persen, golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen, golongan C dengan kadar etanol lebih dari 20 persen, dan golongan D dengan kadar etanol lebih dari 55 persen," jelas Rudi di Ruang Rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5).

Dalam pertemuan tersebut Rudi seraya menekankan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, di dalam pembentukan Raperda dalam rangka membuat Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti yang diketahui RUU Minol saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI.

"Untuk itu terkait kadar presentase yang masuk batas standarisasi yang nantinya dinormakan dalam sebuah peraturan, kami belum tahu pasti apakah nantinya perlu merujuk pada peraturan pemerintah atau aturan dari Kementerian Kesehatan. Yang jelas dalam RUU Minol akan disusun beberapa hal yang terakit dengan kadar Minol yang dibagi menjadi empat golongan tersebut," tutur Rudi.

Pada kesempatan yang sama, Perancang Peraturan

Perundang-Undang Madya BK DPR RI Ricko Wahyudi menambahkan, di dalam pembahasan RUU Minol, pemerintah dan DPR RI belum menyepakati substansi dari judul. Sehingga pada saat ini, Panja Minol belum ada payung hukum yang setingkat dengan Undang-Undang, dan masih pada tingkat peraturan teknis yakni peraturan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

"Namun ada beberapa item yang sudah disepakati tapi masih pada kesepakatan yang sifatnya internal dan belum diundangkan. Maka dari itu, dalam pembentukan UU di dalam draf RUU Larangan Minol, mengacu pada peraturan Menperin dan Mendag yang sudah disepakati. Jadi, baik dari regulasi yang terdapat pada Menperin dan Mendag dan draf RUU yang sudah disepakati, sama tidak ada perubahan," ungkapnya.

Sebelumnya pada pertemuan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi Sugirah memandang, terkait dengan minuman beralkohol masih banyak yang belum diatur di luar dari golongan A,B,C dan D. Salah satunya adalah maraknya peredaran minuman alkohol olahan atau oplosan yang keberadaanya sangat membahayakan kelangsungan hidup khususnya terhadap generasi muda.

"Kalau ini tidak diatur di kemudian hari, tentu ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita. Oleh karena itu masukan kami kepada DPR agar terkait oplosan ini bisa diatur di dalam RUU, sehingga di kemudian hari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengedarkan minuman oplosan tersebut bisa mendapat sanksi yang berat sampai menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi," harapnya. ■ **tra/sf**



Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Rudi Rochmansyah. Foto: Odjie/JK

Bagian Penerbitan DPR Monitoring Produk Parlementaria ke Aceh



Kepala Bagian Penerbitan Dadang Prayitna beserta tim melakukan monitoring dan evaluasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Aceh. Foto: Penerbitan/JK

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang diwakili Kepala Bagian Penerbitan Dadang Prayitna beserta tim melakukan monitoring dan evaluasi Majalah dan Buletin Parlementaria ke Provinsi Aceh, baru-baru ini. Monitoring dilakukan di beberapa tempat, seperti di Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Aceh.

“Tujuan kami dalam rangka monitoring sampai sejauh mana produk Penerbitan sampai ke perpustakaan di Aceh. Kami akan memonitor beberapa titik di Provinsi Aceh, termasuk universitas dan perpustakaan lainnya,”

jelas Dadang di sela-sela memimpin tim meninjau persebaran Majalah dan Buletin Parlementaria.

Menurutnya, Bagian Penerbitan ke depannya akan menjadi *publishing house*, dimana diharapkan seluruh penerbitan produk yang dilakukan Setjen dan BK DPR RI akan dilakukan oleh unit kerja ini. Pihaknya mengharapkan, Provinsi Aceh dapat bekerjasama dengan Bagian Penerbitan untuk mensuplai produk DPR RI lainnya, khususnya guna memenuhi kebutuhan Perpustakaan Aceh akan produk-produk DPR RI.

“Selama ini mahasiswa hanya tahu informasi tentang DPR RI dari media massa, elektronik dan media

sosial. Artinya banyak melihat dari sisi negatifnya saja, seperti absen Rapat Paripurna yang kosong. Bahkan kerap DPR membahas RUU sampai pagi hari itu yang tidak terekspos oleh media massa saat ini,” tambahnya.

Untuk informasi, lanjut Dadang, DPR RI memiliki berbagai media seperti Buletin dan Majalah Parlementaria, Media Sosial, *website* resmi DPR RI, serta Radio dan TV Parlemen. Berdasarkan temuan di lapangan, Perpustakaan Provinsi Aceh membutuhkan rak khusus yang memuat produk DPR RI. Sementara untuk pengiriman produk-produk DPR RI di wilayah Aceh bisa dikatakan tidak menemui masalah. ■ si/sf

Wafatnya Petugas KPPS Harus Jadi Perhatian

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima sejumlah aspirasi terkait wafatnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang selalu bertambah tiap harinya. Kali ini, Fadli menerima aspirasi dari sekelompok ibu-ibu yang menginginkan agar DPR RI mengambil sikap tegas terkait wafatnya petugas KPPS itu. Pasalnya, jumlah petugas KPPS yang wafat sudah mencapai lebih dari 500 orang.

“Yang datang ini ibu-ibu. Mereka konsen tentang wafatnya petugas TPS selalu bertambah. Ini menunjukkan ada masalah tentang sistem Pemilu kita. Banyak spekulasi tentang kematiannya.

Banyak yang mendesak juga untuk dilakukan otopsi,” ujar Fadli usai menerima audiensi Relawan O2 untuk 574 Korban Pemilu di Gedung DPR RI,

”

SEOLAH NYAWA PETUGAS TPS ITU MURAH. PADAHAL URUSAN SAPI MATI SAJA DIINVESTIGASI. SEKARANG ADA HAMPIR 600 ORANG YANG WAFAT.

Senayan, Jakarta, Selasa, (14/05).

Menyangkut wafatnya petugas KPPS ini, politisi Partai Gerindra itu mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan abai. Padahal ratusan nyawa yang wafat ini adalah pejuang demokrasi yang seharusnya mendapat penghargaan dari negara. Ia menilai respon pemerintah juga tidak memadai.

“Seolah nyawa petugas TPS itu murah. Padahal urusan sapi mati saja diinvestigasi. Sekarang ada hampir 600 orang yang wafat. Ini jadi perhatian, kenapa pemerintah tidak merespon secara proporsional. Harusnya pemerintah bisa lebih konsen,” tegas Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.

■ hs/sf



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima audiensi Relawan O2 untuk 574 Korban Pemilu. Foto: Kresha/JK

Pengelolaan Dana BOS Diharapkan Lebih Efektif



Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar bersama peserta diskusi dengan Pejabat Kemendikbud bertema "Efektifitas Upaya Kemendikbud dalam Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP", di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor. Foto: Nadya/od

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar menilai, pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2015-2018 dianggap masih kurang efektif, karena pembenahan baru dilakukan di tahun 2019.

"Mudah-mudahan di tahun 2020 pengelolaan dana BOS akan lebih efektif dan nanti sekolah-sekolah juga tidak tergantung kepada BOS, tapi bisa lebih mandiri," katanya usai memimpin diskusi dengan Pejabat Kemendikbud bertema "Efektifitas Upaya Kemendikbud dalam Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP", di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5).

Lebih lanjut Helmi mengatakan, diskusi yang digelar ini menjadi momentum konfirmasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana BOS di Kemendikbud RI. Mengingat hasil

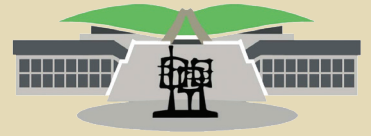
konfirmasi dari Kemendikbud ini akan dilakukan analisis dan pengkajian sebagai bahan masukan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI untuk digunakan sebagai bahan rapat maupun bahan dalam mengambil sebuah keputusan.

Helmi juga menjelaskan, BPK telah mengaudit pengelolaan BOS oleh Kemendikbud dari tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 dilakukan perbaikan pada sistem yang telah mereka buat. Meskipun di sisi lain, banyak sekolah yang kewalahan terhadap aturan atau sistem baru yang telah dibuat Kemendikbud. Utamanya karena minimnya tenaga operator komputer di tingkat SD dan SMP untuk mengoperasikan sistemnya.

"PKAKN DPR RI akan terus menggali informasi terkait dana BOS, pasalnya dana yang telah digelontorkan untuk dana BOS cukup besar dan setidaknya ada 18 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Maka temuan BPK ke depannya akan terus dipantau dan ditelaah oleh PKAKN DPR RI," katanya.

Sementara Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Sutanto menyatakan bahwa pihaknya memang telah banyak melakukan perbaikan sistem, seperti sistem Dapodik, sistem data sekolah, guru, siswa, hingga sarpras, sekaligus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang belum melakukan tugasnya dengan baik. Namun, dirinya juga berharap Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi turut andil dalam memberikan dana pendidikan, jadi tidak hanya mengandalkan dari Dana BOS.

"Seharusnya kabupaten dan kota kepada SD dan SMP, dan provinsi kepada SMK dan SMA. Jadi Pemerintah Daerah masing-masing memberikan tambahan (anggaran pendidikan), supaya sekolah punya dana operasional yang cukup, tidak hanya mengandalkan Dana BOS dari pusat saja. Kan sesuai UU 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa kewenangan sudah di bagi-bagi, kabupaten kota mengelola pendidikan SD dan SMP, dan provinsi mengelola SMA SMK dan SLB, itu harusnya sesuai UU," tutupnya. ■ ndy/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengadakan buka bersama Korps Alumni HMI (KAHMI) dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Rumah Dinas Widya Chandra, Selasa (14/5/2019).
Foto: Naefuroji/JK



Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima kunjungan DPRD Gorontalo di Gedung DPR, Kamis (16/5).
Foto: Eno



Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti bersama pejabat Setjen DPR dan BK meninjau Bazar Ramadan dan Sembako Murah di Pelataran Pujasera DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Foto: Jaka/JK

